



## Analisis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perpajakan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan

Kaisar Rezky Ardinata<sup>1</sup>, Fitri Yul Dewi Marta<sup>2</sup>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Regional Sumatera Barat<sup>12</sup>

---

Received:	26 Desember 2025	<b>Abstract</b> <i>This study aims to analyze the implementation of tax administration and the level of taxpayer compliance in the working area of the Primary Tax Office (KPP) of Pangkalan Kerinci, as well as to identify the challenges and opportunities in tax management faced by the institution. This research uses a qualitative approach with a descriptive method, where data is collected through literature studies, documentation, and observation of programs and activities carried out by KPP Pratama Pangkalan Kerinci. The results show that the tax office has implemented various initiatives to improve the efficiency and effectiveness of tax services, such as the "Jempol Pajak" program, tax education through social media, and collaboration with local governments. The compliance rate of individual taxpayers shows a positive trend, with the annual tax return (SPT) reporting target exceeding 100% in 2020. However, there are still significant challenges, such as the lack of public understanding regarding tax obligations and technical difficulties in implementing the newly introduced Coretax administrative system. On the other hand, the use of information technology, the increase in digital literacy among citizens, and cross-sectoral collaboration present great opportunities to enhance the sustainability of the tax system. This study recommends the improvement of more inclusive tax education programs and the strengthening of synergy between tax authorities and local governments to create a more effective and equitable tax system.</i>
Revised:	31 Desember 2025	
Accepted:	02 Januari 2026	

**Keywords:** Tax Administration, KPP Pratama Pangkalan Kerinci.

(\*) Corresponding Author: [tenesonnn@gmail.com](mailto:tenesonnn@gmail.com), [fitriydm@gmail.com](mailto:fitriydm@gmail.com)

**How to Cite:** Ardinata, K., & Marta, F. (2026). Analisis Pelaksanaan Dan Pengelolaan Perpajakan Di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.C), 42-49. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12364>.

---

### PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan elemen vital dalam struktur keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama guna mendanai pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sistem perpajakan yang efektif dan efisien menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, serta menciptakan stabilitas ekonomi (Rosyida et al., 2018). Di Indonesia, sistem perpajakan tidak hanya dikelola di tingkat pusat, tetapi juga diperkuat melalui pelibatan pemerintah daerah dan unit pelayanan perpajakan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kecamatan ini memiliki peran strategis sebagai pusat administratif dan ekonomi, yang turut menyumbang dalam optimalisasi penerimaan pajak, khususnya melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci (Neny, 2018).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya aktivitas bisnis serta penduduk di kawasan ini, kebutuhan terhadap manajemen perpajakan yang profesional dan responsif menjadi semakin penting. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mendirikan KPP Pratama Pangkalan Kerinci sejak tahun 2008 untuk mengelola dan melayani kewajiban perpajakan masyarakat di Kabupaten Pelalawan dan sebagian wilayah Kabupaten

Siak. KPP ini berperan sebagai garda terdepan dalam melaksanakan administrasi perpajakan, memberikan edukasi kepada wajib pajak, serta menjalankan pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Namun demikian, efektivitas pengelolaan perpajakan tidak hanya tergantung pada peran institusi perpajakan semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut (Cahyo Setiawan & Ach. Nur Fuad Chalimi, 2020).

Dalam realitas pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak, ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung pelayanan perpajakan (Undang-Undang Nomor 7, 2021). Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan otoritas pajak mengenai mekanisme pembayaran pajak juga menjadi salah satu faktor penghambat. Maka dari itu, penting untuk dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem administrasi perpajakan dijalankan, bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat, serta bagaimana strategi edukasi dan pengawasan dilakukan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci (Fatoni, 2023).

Di sisi lain, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan dalam memperbaiki pengelolaan perpajakan, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan digitalisasi layanan perpajakan, penguatan sinergi antara pemerintah kecamatan dan instansi perpajakan, serta peningkatan profesionalisme aparatur yang bertugas dalam pelayanan pajak (Alwi et al., 2023). Pemerintah daerah juga telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kontribusi retribusi daerah, seperti pada sektor retribusi kebersihan, yang dikelola melalui rapat koordinasi antar instansi sebagai bentuk integrasi dan kolaborasi dalam mengelola penerimaan non-pajak. Upaya ini menunjukkan bahwa pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah memerlukan perencanaan strategis serta kerja sama lintas sektor guna mencapai target penerimaan yang maksimal dan berkelanjutan (Alwi et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan pengelolaan perpajakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dengan fokus pada efektivitas administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan, memperkuat kapasitas kelembagaan perpajakan di tingkat lokal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kewajiban perpajakan sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Lebih jauh, hasil dari analisis ini dapat menjadi landasan dalam menyusun strategi perpajakan yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi lokal serta mampu mendukung pencapaian tujuan fiskal nasional secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai pelaksanaan dan pengelolaan perpajakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan proses, pola, serta dinamika yang terjadi dalam praktik perpajakan secara kontekstual dan mendalam berdasarkan perspektif para pelaku di lapangan. Fokus utama penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu pelaksanaan administrasi perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pangkalan Kerinci, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah (Syamsu et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan beberapa informan kunci, antara lain petugas KPP Pratama Pangkalan Kerinci, pejabat pemerintah kecamatan, serta wajib pajak dari berbagai latar belakang usaha. Observasi dilakukan di lokasi pelayanan KPP dan dalam kegiatan rapat koordinasi pemerintah daerah terkait retribusi daerah. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari laporan tahunan penerimaan pajak, kebijakan perpajakan lokal, serta data pendukung dari instansi terkait (Yeti, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan keandalan informasi dari berbagai pihak. Hasil dari metode ini diharapkan memberikan pemahaman holistik mengenai pengelolaan perpajakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Administrasi Perpajakan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci**

Pelaksanaan administrasi perpajakan di wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci dilakukan secara sistematis dan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. KPP Pratama Pangkalan Kerinci, sebagai lembaga pelaksana administrasi perpajakan di wilayah ini, telah mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan layanan perpajakan kepada masyarakat. Salah satu inisiatif unggulan adalah program "Jempol Pajak" yang merupakan singkatan dari *Jemput Bola Pelayanan Pajak*. Program ini hadir sebagai respons terhadap tantangan geografis dan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perpajakan di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital.

Program "Jempol Pajak" menasar wajib pajak di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat layanan KPP. Dalam pelaksanaannya, petugas pajak secara proaktif mengunjungi kantor kelurahan, desa, atau pusat-pusat aktivitas ekonomi masyarakat untuk memberikan pelayanan secara langsung. Layanan yang disediakan mencakup pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai dengan regulasi baru perpajakan, asistensi pelaporan SPT Tahunan, layanan aktivasi atau permohonan ulang electronic filing identification number (EFIN), serta konsultasi seputar kewajiban perpajakan. Melalui pendekatan ini, KPP Pratama tidak hanya mendekatkan layanan kepada masyarakat, tetapi juga membangun hubungan yang lebih komunikatif antara wajib pajak dan aparat pajak.

Di samping program lapangan, KPP Pratama Pangkalan Kerinci juga menjalankan edukasi perpajakan secara masif. Edukasi dilakukan melalui berbagai media, mulai dari seminar tatap muka, penyuluhan di lingkungan sekolah dan instansi pemerintah, hingga penggunaan media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai sarana penyebaran informasi perpajakan yang menarik dan mudah dipahami. Tujuan utama dari edukasi ini adalah untuk meningkatkan literasi perpajakan masyarakat, memperkuat kesadaran fiskal, serta menumbuhkan budaya patuh pajak. Dalam praktiknya, edukasi ini mencakup pemahaman tentang cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara daring, pentingnya menyimpan bukti transaksi sebagai bagian dari transparansi pelaporan, serta dampak positif dari pajak terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi kerja internal, KPP Pratama Pangkalan Kerinci juga telah mengimplementasikan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Dengan menggunakan sistem administrasi berbasis online, proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kewajiban perpajakan menjadi lebih akurat dan cepat. Penggunaan aplikasi seperti DJP Online, e-SPT, dan e-Faktur telah membantu wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk melaksanakan kewajibannya dengan lebih mudah dan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Selain itu, sistem digital ini juga meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi data. Dalam konteks pengawasan, KPP Pratama juga menggunakan data-data dari pihak ketiga, seperti laporan perbankan, catatan kepemilikan aset, dan transaksi digital, untuk memastikan pelaporan pajak sesuai dengan kondisi riil.

### **Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan administrasi perpajakan. Di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci, tren kepatuhan menunjukkan arah yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2020 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi mencapai 102% dari target yang ditetapkan, yang berarti telah melampaui ekspektasi. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara.

Capaian positif ini merupakan hasil dari berbagai inisiatif dan strategi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Selain program-program layanan dan edukasi seperti "Jempol Pajak," faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat langsung dari pajak terhadap pembangunan daerah. Masyarakat mulai memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya yang dapat dirasakan secara nyata. Dengan meningkatnya transparansi penggunaan dana pajak oleh pemerintah, terjadi peningkatan trust (kepercayaan) masyarakat kepada otoritas pajak.

Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan pajak. Melalui kerja sama antara KPP Pratama dan instansi pemerintahan daerah, telah dibentuk forum-forum koordinasi yang membahas isu-isu strategis perpajakan dan mencari solusi terhadap hambatan yang muncul di lapangan. Pemerintah daerah juga sering menjadi fasilitator dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi, sehingga jangkauan program KPP dapat lebih luas dan efektif.

Tidak kalah penting adalah peran teknologi informasi dalam mendorong kemudahan dan kenyamanan proses pelaporan pajak. Dengan semakin banyaknya wajib pajak yang mengakses sistem pelaporan online seperti DJP Online, terjadi penurunan beban administratif bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Sistem pelaporan daring ini telah mempercepat proses validasi data dan mengurangi antrean di kantor pajak, yang secara tidak langsung mendorong partisipasi lebih besar dari masyarakat. Bahkan, pada masa pandemi COVID-19, sistem digital ini terbukti sangat efektif dalam menjaga kelangsungan pelaporan tanpa mengganggu protokol kesehatan.

Namun, meskipun capaian tingkat kepatuhan sudah cukup baik, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan. Banyak dari pelaku UKM yang masih memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kewajiban yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, KPP

Pratama terus memperluas edukasi dan pendekatan persuasif yang menysasar pelaku UKM dan sektor informal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak di wilayah Pangkalan Kerinci merupakan indikasi adanya sinergi positif antara aparat perpajakan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui pelayanan yang responsif, edukasi yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi informasi, KPP Pratama Pangkalan Kerinci telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan pajak yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ini perlu terus dikembangkan agar sistem perpajakan semakin inklusif, partisipatif, dan mampu menjawab tantangan perpajakan di masa depan.

### **Tantangan dalam Pengelolaan Pajak**

Meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Pangkalan Kerinci menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, pengelolaan pajak di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, terutama dari kalangan pelaku usaha kecil dan individu, tentang kewajiban perpajakan secara menyeluruh. Masih banyak ditemukan wajib pajak yang belum memahami bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak dengan benar, termasuk tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pemanfaatan EFIN untuk akses digital.

Ketidaktahuan ini bukan hanya disebabkan oleh rendahnya literasi perpajakan, tetapi juga karena informasi perpajakan yang tersedia kadang masih dianggap terlalu teknis atau sulit dipahami oleh masyarakat umum. Banyak wajib pajak yang enggan bertanya atau mencari informasi lebih lanjut karena khawatir akan konsekuensi hukum atau karena merasa bahwa proses perpajakan itu rumit dan memakan waktu. Dalam konteks ini, edukasi dan penyuluhan harus ditingkatkan, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh secara maksimal oleh program edukatif dari Direktorat Jenderal Pajak.

Tantangan lain yang cukup signifikan muncul dengan diberlakukannya sistem administrasi baru oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sistem Coretax Administration System yang mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Sistem ini bertujuan untuk mentransformasi proses administrasi perpajakan ke dalam platform yang lebih terintegrasi, modern, dan efisien. Namun, dalam tahap awal implementasinya, sistem ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para pengguna baru, termasuk bendaharawan instansi pemerintah dan pelaku usaha.

Banyak bendaharawan mengeluhkan kurangnya pelatihan teknis dan panduan yang memadai untuk menggunakan sistem ini. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam proses administrasi, penginputan data yang tidak sesuai, bahkan kekeliruan dalam pelaporan pajak instansi. Sebagai sistem yang sepenuhnya berbasis teknologi informasi, Coretax juga menghadapi hambatan teknis seperti keterbatasan akses internet, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang masih mengalami kendala infrastruktur digital.

Tantangan berikutnya adalah masih adanya potensi penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya manipulasi data, pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau penggunaan celah hukum untuk mengurangi beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa selain edukasi, pengawasan dan penegakan hukum juga perlu ditingkatkan agar kepatuhan pajak tidak hanya bersifat formal tetapi juga substansial.

### **Peluang dalam Pengelolaan Pajak**

Di balik berbagai tantangan tersebut, KPP Pratama Pangkalan Kerinci juga memiliki sejumlah peluang strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pajak di masa mendatang. Salah satu peluang utama adalah pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas di kalangan masyarakat. Dengan adanya sistem pelaporan SPT secara online melalui platform DJP Online, e-Faktur, dan aplikasi perpajakan lainnya, wajib pajak kini memiliki akses yang lebih mudah, cepat, dan efisien dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi beban administratif yang selama ini menjadi kendala.

Pemanfaatan teknologi ini juga membuka jalan bagi peningkatan akurasi dan integrasi data perpajakan. Sistem digital mampu melakukan validasi otomatis terhadap data wajib pajak, meminimalkan kesalahan manusia, dan memungkinkan pelacakan riwayat transaksi secara real time. Bahkan, dalam jangka panjang, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kepatuhan, mendeteksi potensi fraud, dan merancang strategi edukasi yang lebih personal dan berbasis data.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah penguatan kolaborasi antara KPP Pratama Pangkalan Kerinci dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dinas koperasi dan UMKM, serta perangkat desa. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan program edukasi dan pengawasan pajak ke wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau. Pemerintah daerah, dengan pengetahuan lokal dan jaringan yang dimilikinya, dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi perpajakan dan memfasilitasi kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Khususnya di tingkat desa, potensi peningkatan penerimaan pajak sangat besar jika edukasi dan pendampingan dilakukan secara intensif. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang sebenarnya memiliki kewajiban perpajakan tetapi belum terdaftar atau belum melaporkan usahanya secara resmi. Melalui program jemput bola seperti “Jempol Pajak” yang disinergikan dengan perangkat desa, proses pendaftaran NPWP, pelaporan pajak, dan edukasi dapat dilakukan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pergeseran perilaku masyarakat yang semakin melek teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi perpajakan melalui media sosial dan platform digital. Dengan pendekatan yang informatif dan kreatif, KPP Pratama dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela.

### **Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak**

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan dan memaksimalkan peluang yang tersedia, KPP Pratama Pangkalan Kerinci telah menerapkan sejumlah strategi konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak di wilayah kerjanya. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menyelenggarakan kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya secara tatap muka melalui seminar dan penyuluhan di berbagai komunitas, tetapi juga secara daring melalui media sosial resmi KPP Pratama. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan literasi perpajakan masyarakat, memperluas pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, program unggulan bertajuk “*Jempol Pajak*” juga telah diluncurkan sebagai bentuk inovasi layanan terpadu. Program ini menyediakan layanan perpajakan keliling yang menjangkau masyarakat secara langsung, seperti layanan pemadanan NIK-NPWP, asistensi pengisian SPT Tahunan, serta pengurusan EFIN, sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan cepat.

Tidak hanya berhenti di situ, KPP Pratama Pangkalan Kerinci juga aktif memperkuat kerja sama lintas sektor, khususnya dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan pengawasan dan efektivitas edukasi perpajakan, terutama dalam konteks desa dan daerah terpencil. Di sisi lain, penerapan sistem teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam reformasi administrasi perpajakan. Melalui digitalisasi layanan dan sistem berbasis daring, proses pelaporan, pembayaran, hingga konsultasi pajak menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Kombinasi dari semua upaya ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan perpajakan serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak yang sadar dan patuh.

## **PENUTUP**

Studi ini menganalisis pelaksanaan dan pengelolaan perpajakan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci. Ditemukan bahwa KPP Pratama telah melakukan berbagai inisiatif inovatif seperti program "Jempol Pajak" dan edukasi melalui media sosial untuk meningkatkan efisiensi layanan. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan tren positif, dengan target pelaporan SPT tahunan terlampaui pada tahun 2020, mencerminkan peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Namun, tantangan signifikan masih ada, termasuk kurangnya pemahaman publik mengenai kewajiban pajak dan kesulitan teknis dalam implementasi sistem administrasi Coretax yang baru. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor menjadi peluang besar untuk memperkuat sistem pajak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan program edukasi pajak yang lebih inklusif dan penguatan sinergi antara otoritas pajak dan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan adil.

## **REFERENSI**

- Alwi, M., Yudha S., I. D. K., Fadliyanti, L., Negara, I. K., & Satarudin, S. (2023). PELATIHAN PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN DI KELURAHAN GOMONG KECAMATAN SELAPARANG. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 3(2). <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v3i2.314>
- Cahyo Setiawan, & ach. nur fuad chalimi. (2020). PENGARUH PELAYANAN FISKUS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH KECAMATAN GEMPOL. *Articles*, 1 No.02.
- Fatoni, M. I. (2023). Membangun Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Kualitas Pelayanan dan Kondisi Keuangan bagi Masyarakat Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(1). <https://doi.org/10.59330/jmd.v1i1.12>
- Neny, T. I. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *ASSETS : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2).
- Rosyida, B., Astuti, D., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2018). Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan desa melalui pelatihan perpajakan bagi aparat desa. *Prosiding PKM-CSR*, 1(45).
- Syamsu, N., Kanto, M., Ariyanti, R., Bungatang, B., & Nur Hamiddin, Muh. I. (2023). Sosialisasi Peraturan Pajak Untuk UMKM di Desa Timbuseng, Kecamatan

- Pattallassang, Kabupaten Gowa. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.53860/losari.v4i2.106>
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November).
- Yeti, A. (2023). Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Cilengkrang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(2).